

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan tujuan dari suatu negara, dimana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada pembangunannya. Pembangunan dilakukan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pembangunan ekonomi dengan mengatasi berbagai masalah sosial dan pembangunan, seperti pengangguran dan kemiskinan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu prioritas pembangunan adalah pengurangan atau penghapusan kemiskinan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok orang di mana tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan masalah besar bagi banyak negara di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional. Kemiskinan suatu negara atau wilayah juga mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal di sana.<sup>2</sup> Kemiskinan merupakan penyakit ekonomi dan karenanya harus disembuhkan atau paling tidak bisa dikurangi. Indonesia adalah negara berkembang dan kemiskinan adalah masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Kemiskinan terus menjadi masalah utama sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Kemiskinan membuat jutaan anak tidak menerima pendidikan yang berkualitas, mengalami kesulitan membayar perawatan kesehatan, tidak memiliki tabungan dan investasi, tidak memiliki akses ke layanan publik, setengah pengangguran, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, meningkatnya arus urbanisasi ke kota, dan lebih buruk lagi kemiskinan memungkinkan jutaan orang untuk

---

<sup>1</sup> Fajrin Hardinandar, "Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua)," *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4(1) (T.T.).

<sup>2</sup> Teddy Christianto, "Determinan Dan Karakteristik Kemiskinan Di Provinsi Riau" Vii (2013).

membatasi diri mereka sendiri dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan memaksa penduduk desa rela mengorbankan keselamatan jiwa.<sup>3</sup>

Pandangan islam terhadap masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh, dalam Al-Quran disebutkan Agama Islam merupakan agama *rohmatan li al- al- al-amin*,<sup>4</sup> sehingga memandang masalah kemiskinan ini adalah masalah yang wajib diperhatikan. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan jarang sekali disebabkan oleh satu faktor. Penyebab kemiskinan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti: pendidikan yang rendah, kurangnya modal atau keterampilan untuk usaha, kurangnya kesempatan kerja, PHK (pemutusan hubungan kerja), kurangnya jaminan sosial dan hidup di lokasi terpencil.<sup>5</sup> Menyelesaikan Masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara terpisah dari masalah-masalah tersebut. pengangguran, pendapatan, pendidikan, kesehatan dan masalah lain yang disebutkan secara khusus sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan.<sup>6</sup>

Permasalahan kemiskinan tidak hanya permasalahan nasional tetapi juga merembet kesetiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan relatif masih tinggi adalah Kabupaten Pati. yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan telah dilakukan dan menjadi hasilnya, angka kemiskinan pada setiap Kabupaten

---

<sup>3</sup> Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya,” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* ,Volume 9, Nomor 1, (April 2009): 56–68.

<sup>4</sup> Al-Quran, Surat Al Anbiya Ayat 107

<sup>5</sup> Ari Mulianta Ginting Dan Rasbin, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1 (Desember 2010).

<sup>6</sup> Aldi Bagus Satria, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Periode Tahun 2017 – 2021,” *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, No. 4 (14 Desember 2022): 167–82, <https://doi.org/10.58192/Profit.V1i4.356>.

di Indonesia telah berkurang namun berjalan lambat serta masih tergolong tinggi salah satunya di Kabupaten Pati karena banyak masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kabupaten Pati merupakan kawasan yang strategis secara ekonomi, sosial budaya dan memiliki potensi sumber daya alam dan manusia untuk dikembangkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan Pariwisata. Berdasarkan informasi yang diterima, potensi utama wilayah ini terletak pada sektor pertanian, potensi pertanian cukup besar antara lain tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.<sup>7</sup> Tetapi sayangnya pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Pati masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pati pada tabel berikut.

**Gambar 1. 1**  
**Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Pati**  
**2018-2022 (persen)**



Sumber : Data diolah, BPS Kabupaten Pati (2023)

Gambar 1.1 Presentase kemiskinan di Kabupaten Pati periode 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Kenaikan terjadi pada periode 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi Covid-19. Sehingga terjadi penurunan tingkat perekonomian di masyarakat dan menaikkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati diukur dari persepsi kemampuan penduduk Pati dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan pemerintah saat ini sangat diperlukan bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kehadiran subsidi pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang erat kaitannya dengan kemiskinan.

<sup>7</sup> Pemerintah Kabupaten Pati, “Profil Kabupaten Pati,” Diakses 9 Maret 2023, <https://Patikab.Go.Id/V2/Id/2009/09/07/Sekilas-Pati/>.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat mutlak untuk pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan negara. Setiap negara mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan mengurangi kemiskinan. Banyak negara di dunia persyaratan yang paling penting dalam pengurangan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara berkembang termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia hasil yang diperoleh juga disertai dengan masalah meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>8</sup> Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan merupakan syarat atau kebutuhan yang paling penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran yang lebih besar. Pada pembangunan ekonomi di daerah, tujuan pembangunan itu sendiri hampir tidak berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Namun, proses pembangunan daerah jauh lebih spesifik.<sup>9</sup> Setiap daerah selalu menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan merupakan syarat terpenting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di daerah.<sup>10</sup> Peningkatan pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan produksi barang/jasa manufaktur. Oleh karena itu, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga kemiskinan berkurang dan semakin menurun.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Arius Jonaidi, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia," T.T.

<sup>9</sup> Tulus Th Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

<sup>10</sup> Charley M. Bisai, Dorothy Iriani Hamadi, Dan Marsi Adi Purwadi, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Harga Konsumen Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Jayapura," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 8, No. 2 (1 Agustus 2021), <https://doi.org/10.56076/JkEsp.V8i2.2106>.

<sup>11</sup> Lincolin Arsyad, *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2011).

**Gambar 1.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pati Tahun 2018-2022**  
**(persen)**



Sumber : Data diolah, BPS Kabupaten Pati (2023)

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan hingga minus 1,16 persen. Sedangkan di 2021 mulai mengalami kenaikan meskipun secara perlahan. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati mulai membaik, setelah terpuak akibat adanya pandemi Covid-19. Pembangunan ekonomi dan kemiskinan yang memiliki ikatan kuat, pembangunan ekonomi sering dijadikan sebagai tolak ukur kapasitas ekonomi suatu daerah, tetapi belum tentu tingginya pembangunan ekonomi menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi sangat pesat berguna untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Zuhdiyati & David Kaluge terhadap 33 provinsi di Indonesia periode 2011-2015 menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.<sup>12</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinta & Eny Fahrati terhadap pengaruh kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2019.<sup>13</sup> Berbanding terbalik dengan penelitian yang

<sup>12</sup> Noor Zuhdiyaty, “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)” 11 (2017).

<sup>13</sup> Sinta Sinta Dan Eny Fahrati, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2019,” *Jiep: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 5, No. 1 (31 Mei 2022): 81, <https://doi.org/10.20527/Jiep.V5i1.5501>.

dilakukan oleh Reki Ardian, dkk bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara individual berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dari tahun 2000-2017.<sup>14</sup> Pertumbuhan ekonomi juga erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, jika pertumbuhan ekonomi rendah maka tingkat pengangguran akan meningkat dan jika pengangguran meningkat maka pendapatan masyarakat akan menurun yang berujung pada peningkatan kemiskinan. Menurunnya pendapatan masyarakat juga terkait dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan upah yang tidak sesuai.

Kasus yang banyak terjadi di Indonesia adalah upah yang ditawarkan tidak sebanding dengan produktivitas tenaga kerja, atau upah yang ditawarkan terlalu rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup mereka. Menyadari kenyataan bahwa upah yang diterima pekerja lebih rendah dari yang seharusnya, diusulkan kebijakan upah minimum. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pekerja bergaji rendah, pekerja muda, mengurangi kesenjangan pendapatan dan merupakan alat untuk memerangi kemiskinan.<sup>15</sup> Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk membayar upah pekerja di lingkungan usaha atau pekerjaannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Reki Ardian, Yulmardi Yulmardi, Dan Adi Bhakti, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi,” *Jurnal Ekonomi Aktual* 1, No. 1 (3 Agustus 2021): 23–34, <https://doi.org/10.53867/Jea.V1i1.3>.

<sup>15</sup> Padel Aji Pamungkas Dan Agus Suman, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011-2016,” T.T.

<sup>16</sup> Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” 2022,

Penerapan kebijakan upah minimum sendiri di Indonesia dilakukan sedemikian rupa supaya ada batasan minimum bagi perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung karyawan yang terjebak kemiskinan. Gaji diharapkan meningkat setiap tahun untuk kebutuhan rumah layak huni dan berbagai aspek lainnya juga meningkat sehingga upah nominal terus disesuaikan. Perkembangan UMK yang meningkat ini akan berdampak terhadap pendapatan yang meningkat. Jika pendapatan meningkat maka akan berdampak pada kemampuan masyarakat yang bekerja untuk meningkatkan konsumsi dalam hal pembelanjaan dan hal tersebut akan meningkatkan ekonomi secara keseluruhan dan berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat.

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Pati**  
**Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Upah Minimum Kabupaten Pati</b>
2018	Rp1.585.000
2019	Rp1.742.000
2020	Rp1.891.000
2021	Rp1.953.000
2022	Rp1.968.339

Sumber : Data diolah, BPS Provinsi Jawa Tengah (2023)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 terus mengalami kenaikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kabupaten Pati setiap tahun mengalami kenaikan. Kenaikan UMK Kabupaten Pati tahun 2022 kecil karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga kecil. Kenaikan upah minimum besarnya disesuaikan dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Penelitian yang dilakukan Nurlaila Maysaroh Chairunnisa & Yuha Nadhirah Qintharah bahwa upah minimum kota/ kabupaten tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.<sup>17</sup> Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

---

File:///C:/Users/Hp/Downloads/Permenaker%20nomor%2018%20tahu  
n%202022.Pdf.

<sup>17</sup> Nurlaila Maysaroh Chairunnisa Dan Yuha Nadhirah Qintharah, "Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020,"

Muhammad Sabyan & Rina Widyanti Upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kota Jambi.<sup>18</sup> Berbanding hasil dengan penelitian yang dilakukan Khairil Ihsan & Ikhsan yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.<sup>19</sup> Jika upah yang diberikan sesuai, maka pendapatan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi pengeluaran keperluan hidup mereka. Ketika kebutuhan hidup sudah terpenuhi, tidak akan mengalami kemiskinan dan pengangguran akan rendah, sehingga tingkat kemiskinan juga akan rendah.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang berinteraksi dalam pola yang tidak selalu mudah dipahami. Pengangguran, jika tidak segera diatasi, dapat menyebabkan kerawanan sosial dan kemungkinan kemiskinan. Meningkatnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang kompleks dan lebih serius daripada perubahan distribusi pendapatan yang kurang berpihak pada penduduk berpenghasilan rendah.<sup>20</sup> Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan pekerjaan baru atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) akan tetapi mau bekerja jika ada peluang, atau tidak mencari pekerjaan / tidak mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Permasalahan pengangguran ini merupakan persoalan serius karena dapat menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi

---

*Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (Peta)* 7, No. 1 (27 Januari 2022): 147–61, <https://doi.org/10.51289/Peta.V7i1.530>.

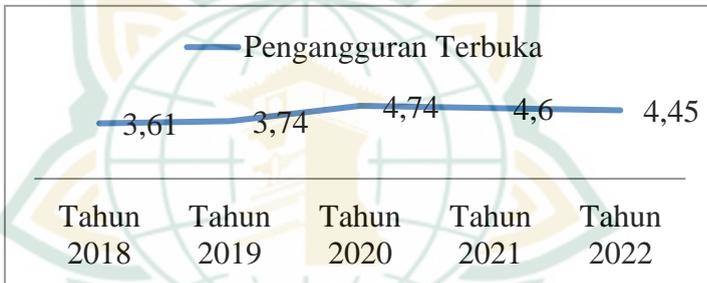
<sup>18</sup> Muhammad Sabyan Dan Rina Widyanti, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi,” *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 8, No. 3 (28 Oktober 2022), <https://doi.org/10.31869/Me.V8i3.3813>.

<sup>19</sup> Khairil Ihsan, “Analisis Pengaruh Ump, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh” 3, No. 3 (2018).

<sup>20</sup> Mohammad Rifqi Muslim, “Pengangguran Terbuka Dan Determinannya” 15 (T.T.).

maksimal.<sup>21</sup> Angka pengangguran dan angkatan kerja menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus dilibatkan dalam proses pembangunan, yang berarti bahwa angka pengangguran dan angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang sangat mungkin untuk menggiring proses perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa penggerak proses pembangunan harus mampu menggerakkan seluruh angkatan tenaga kerja agar jumlah tenaga kerja yang besar menjadi beban bagi pembangunan ekonomi.<sup>22</sup>

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2018-2022 (persen)**



Sumber : Data diolah, BPS Kabupaten Pati (2023)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Pati mengalami penurunan. Tahun 2020 mengalami kenaikan lagi dikarenakan masuknya covid-19 yang mengakibatkan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan akibat pandemi. Banyak masyarakat yang di PHK oleh perusahaan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang menganggur. Pengangguran ini juga akan berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Pati. Pengangguran menurunkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai. Semakin turunya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain, yaitu kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Mu'tiqul Azmi & Jihad Lukis Panjawa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang terhadap kemiskinan di Indonesia dengan

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, "Ketenagakerjaan Kabupaten Pati," 2020, <https://Patikab.Bps.Go.Id/>.

<sup>22</sup> Muslim, "Pengangguran Terbuka Dan Determinannya."

menggunakan data sekunder dan timer series dalam bentuk tahunan dari tahun 1996-2021.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vikky Lukmawan hasil analisis pengangguran tidak berpengaruh terhadap mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah, artinya peningkatan pengangguran tidak memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.<sup>24</sup> Kabupaten Pati berhasil menurunkan kemiskinan dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan sejalan dengan penurunan pengangguran terbuka serta didukung pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan Upah Minimum yang terus naik.

Penelitian serupa telah banyak dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, beberapa faktor dipilih sebagai subjek/sasaran penelitian dan beberapa penelitian menunjukkan hasil yang menarik karena menunjukkan hasil yang beragam sehingga hal ini menimbulkan kesenjangan atau (*research gap*). Pembaruan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada konsep dan subjek penelitian, dalam penelitian ini penulis mengembangkan variabel dengan mempertimbangkan fenomena yang sedang terjadi. Memilih objek penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pati, karena melihat tidak banyaknya penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pati. Berdasarkan dari hasil uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**”PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2022”** Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan tingkat Pengangguran mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kabupaten Pati.

---

<sup>23</sup> Reza Mu'tiqul Azmi Dan Jihad Lukis Panjawa, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan,” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2, No. 6 (16 September 2022): 127–40, <https://doi.org/10.55047/Transekonomika.V2i6.277>.

<sup>24</sup> Vikky Lukmawan, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Pengangguran, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Di Jawa Tengah 2014 -2018),” T.T.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Pati Tahun 2011-2020 sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022?
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022?
3. Apakah Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pati Tahun 2013-2022

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Akademis
  - a. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh di perkuliahan.

- b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya.
  - c. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan kemiskinan di Kabupaten Pati.
2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang berminat dengan persoalan Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran serta kemiskinan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

#### 1. Bagian Awal

Bagian Awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

#### 2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari BAB I, II, III, IV dan V yang masing masing memiliki bagian yang berbeda-beda pada setiap babnya, berikut penjelasannya:

- a. BAB I Pendahuluan. Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat kemiskinan di Indonesia serta fenomena kemiskinan di Kabupaten Pati, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- b. BAB II Kajian Teori. Menyajikan landasan teori tentang teori kemiskinan, pengertian pertumbuhan ekonomi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, teori upah minimum Kabupaten, hubungan antara upah minimum Kabupaten dan tingkat kemiskinan, teori pengangguran, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu pada bab ini juga terdapat penelitian

- terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat diambil.
- c. BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang mengenai jenis subjek, objek, metode pengumpulan data, jenis, sumber, populasi, sampel, batasan operasional, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data dalam penelitian
  - d. Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, yaitu kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran di Kabupaten Pati, analisis data dan pembahasan.
  - e. BAB V Penutup. Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, saran serta rekomendasi bagi penelitian yang akan datang.
3. Bagian Akhir
- Bagian akhir dalam penelitian ini terdiri dari: daftar pustaka, daftar lampiran.